



## ANALISIS TIPOLOGI WILAYAH SEBAGAI ARAHAN UNTUK KEBIJAKAN PENYERASIAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Oleh :

Riza Fathoni I.,<sup>1</sup> Syarifudin D.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Dosen Tetap Prodi Teknik Industri Universitas Pasundan Bandung, jabatan fungsional lektor, email : rizafathoni40@gmail.com

<sup>2</sup> Dosen Tetap Prodi Perencanaan Wilayah & Kota Universitas Pasundan Bandung, jabatan fungsional asisten ahli, email : dden.syar@gmail.com

### ABSTRAK

*Penelitian ini diarahkan untuk melakukan analisis tipologi wilayah sebagai arahan untuk kebijakan penyerasian pengembangan wilayah. Implementasi penyerasian pengembangan wilayah merupakan trend saat ini dalam menstrukturisasi wilayah baik spatial maupun temporal. Pendekatan pamarataan dan disparitas menjadi kunci yang melatarbelakangi strukturasi kewilayahan dalam kesisteman. Penelitian ini mencoba mengarahkan pada tipologi wilayah berdasarkan ekonomi, spatial dan lingkungan, kelembagaan dan kebijakan yang menjadi unsur pembeda antar wilayah. Unit analisis dalam penelitian ini adalah provinsi yaitu di Provinsi DIY, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Bali. Dalam mencapai tujuan studi ini, maka dilakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder dengan menggunakan pendekatan deskriptif serta analisis ketimpangan ekonomi dan desk study dokumen kebijakan, spatial dan lingkungan.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu adanya perlakuan pada berbagai tipologi ekonomi wilayah di tiap provinsi perbedaan struktur spatial dan sumberdaya yang dimiliki perlu dilakukan penyesuaian dalam implementasi penyerasian. Disisi lain dokumentasi kebijakan perlu diarahkan untuk pencapaian rencana yang akuntabilitas dan terukur/measurement disamping memerlukan keserasian antara rencana pembangunan dan rencana penataan ruang. Kesiapan sumberdaya manusia sebagai implementator menjadi kendala tersendiri dalam mencapai keserasian pengembangan wilayah, disamping kendala kelembagaan baik dari sisi administratif maupun kesisteman.*

**Kata Kunci** : Analisis, Tipologi Wilayah, Arahan, Kebijakan Penyerasian, Pengembangan Wilayah

### I. PENDAHULUAN

Konsekuensi logis dari pembangunan daerah dalam era globalisasi saat ini adalah berhadapannya seluruh daerah di wilayah nasional dengan tingkat persaingan yang semakin tajam secara langsung dalam pemasaran barang dan jasa, baik di pasar domestik maupun internasional. Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas potensi unggulan daerah, termasuk sumber daya alam dan sumber daya manusia adalah merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda-tunda lagi pelaksanaannya, serta memerlukan sumber daya yang sangat besar dalam kondisi keterbatasan yang dihadapi dewasa ini. Fakta menunjukkan bahwa masih banyak daerah-daerah yang belum menunjukkan kemajuan dalam pembangunan atau tertinggal dari daerah lain. Padahal, UUD 1945

mengamanatkan adanya pemerataan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Hal itu juga ditunjukkan oleh salah satu misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025, yakni terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan ditandai oleh tingkat pembangunan yang makin merata ke seluruh wilayah diwujudkan dengan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat, termasuk berkurangnya kesenjangan antar wilayah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam mengakselerasikan pembangunan daerah di level provinsi dan kabupaten/kota. Kebijakan percepatan pembangunan daerah dilakukan baik oleh pemerintah (pusat dan daerah) maupun

bekerjasama dengan negara lain. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kesenjangan antar-wilayah, kemiskinan dan pengangguran ditangani melalui berbagai kebijakan dan program, dengan arah kebijakan dan strategi pembangunan kewilayahan sebagai berikut :

- Mendorong pertumbuhan wilayah-wilayah potensial di luar Jawa-Bali dan Sumatera dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera.
- Meningkatkan keterkaitan antar wilayah melalui peningkatan perdagangan antar pulau untuk mendukung perekonomian domestik.
- Meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan sektor-sektor unggulan di tiap wilayah.
- Mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal, kawasan strategis dan cepat tumbuh, kawasan perbatasan, kawasan terdepan, kawasan terluar, dan daerah rawan bencana.
- Mendorong pengembangan wilayah laut dan sektor-sektor kelautan.

Pendekatan utama dalam mengatasi tantangan tersebut adalah melalui pelaksanaan percepatan pengembangan wilayah dengan mengutamakan peningkatan daya saing sebagai dasar pertumbuhan daerah. Pendekatan pengembangan wilayah merupakan salah satu solusi yang dianggap tepat dalam mengakselerasikan pembangunan daerah. Pembangunan wilayah dipandang sebagai proses atau tahapan kegiatan pembangunan di suatu wilayah tertentu yang dalam perwujudannya melibatkan interaksi antara sumber daya manusia dengan sumber daya alam termasuk sumber daya buatan dan lingkungannya melalui kegiatan investasi pembangunan. Dalam investasi pembangunan nasional, maka pertimbangan pemerataan dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah sering menjadi masalah yang belum dapat diatasi secara baik.

Dalam konteks kondisi di atas, penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam untuk mendukung kebijakan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan terkait kebijakan dalam hal penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah, sekaligus diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan terkait dengan pengembangan wilayah pada umumnya dan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah antar provinsi dan kabupaten/kota pada khususnya.

Maksud kajian ini adalah untuk melakukan analisis tipologi wilayah sebagai arahan untuk kebijakan penyerasian pengembangan wilayah. Tujuan kajian ini adalah memberikan arahan bagi pemerintah dalam implementasi kebijakan penyerasian pengembangan wilayah.

## II. METODOLOGI

### 2.1 Metode Penelitian

Dalam menjawab permasalahan dan pertanyaan penelitian, pemilihan strategi atau metode penelitian merupakan langkah awal yang sangat penting dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggabungkan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menghitung unsur-unsur analisis disparitas perekonomian wilayah.

Selanjutnya metode kualitatif digunakan untuk melakukan interpretasi, dan korelasi berdasarkan data dari metode kuantitatif. Metode kualitatif dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif eksploratif. Pendekatan deskriptif eksploratif digunakan dalam penelitian ini karena digunakan untuk memahami keterkaitan unsur-unsur dalam keserasian kebijakan pengembangan wilayah.

### 2.2 Data Penelitian

Dalam pengkajian ini akan dianalisis dari aspek – aspek ketimpangan dan kesenjangan pembangunan antar daerah yang meliputi :

- a. Aspek Infrastruktur
- b. Aspek Ekonomi dan Sumber Daya Alam
- c. Aspek Tata Ruang, Geografis Wilayah
- d. Aspek Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Dengan aspek ini akan dilakukan penggalian dan pendalaman mengenai pembangunan antar daerah , sehingga dapat didapat informasi lebih rinci mengenai indikator yang akan dilakukan generalisasi dari sampel Pembangunan Wilayah II Indonesia meliputi : Provinsi DI Yogyakarta, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Bali.

### 2.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data primer dan sekunder akan dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu, yaitu :

1. Observasi langsung ke lapangan. Metode ini bertujuan untuk mengamati obyek penelitian dari sisi kemasyarakatannya, kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kelembagaan unit-unit masyarakat, sehingga diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang obyek yang akan diteliti.

2. Wawancara. Metode ini merupakan suatu teknik pengumpulan data berupa komunikasi verbal dan wawancara mendalam (*deep interview*) dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyerasian pengembangan wilayah (Bappeda Provinsi dan Masyarakat)

3. Kuisisioner atau Angket Penelitian

Kuesioner atau angket yang akan digunakan berupa daftar pertanyaan dan pernyataan bersifat terbuka dan semi terstruktur berkaitan dengan penyerasian pengembangan wilayah.

## 2.4 Analisis Data

### 1. Analisis Kebijakan Pembangunan

Pada tahap ini dilakukan review, identifikasi serta analisis konstruktif dari dokumen yang berkaitan dengan Kebijakan Penyerasian dan Pengendalian meliputi: Renstra Kemendagri, Permendagri mengenai sinergitas pembangunan daerah, Program-program pembangunan daerah. Kaitan dengan kebijakan penataruangan wilayah, pengembangan masterplan ekonomi (MP3EI, MP3K, KEK, KAPET, MDGS, RPJMN, RPJMD, RPJPN, RPJPD, RKP, RKPDP).

### 2. Analisis Ekonomi Wilayah

Kajian Kebijakan Penyerasian dan Pengendalian Pengembangan Wilayah di susun dengan melakukan pendekatan terhadap aspek-aspek yang terkait dengan kesenjangan wilayah. Tujuan dari strategi penyerasian adalah upaya untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dan meningkatkan sinergitas pembangunan antar wilayah.

a. **Analisa Kesenjangan Perekonomian Antar daerah.** Untuk merepresentasikan pendapatan regional, digunakan parameter output regional (pendekatan produksi) yang sangat terkait dengan area tertentu, dalam hal ini kabupaten/kota digunakan sebagai satuan terkecil. Data yang digunakan ialah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut kabupaten/kota. Dalam hal ini, PDRB menunjukkan total nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh perekonomian suatu daerah (kabupaten/kota) selama satu tahun.

b. **Metode Analisa Pendapatan Regional.** Metode analisa kesenjangan regional dapat ditunjukkan berdasarkan perhitungan

disparitas PDRB Perkapita antardaerah, perhitungan indeks Theil, indeks L dan  $CV_w$  ( $CV$  Williamson).

### 3. Analisis Aspek Kelembagaan

Pada analisa kelembagaan, hal yang diperhatikan adalah :

- (1) Analisa peran dan fungsi (koordinasi)
- (2) Analisa aturan main

Berikut ini adalah rincian mengenai indikator kebijakan dan kelembagaan daerah yang terkait dengan pengembangan wilayah:

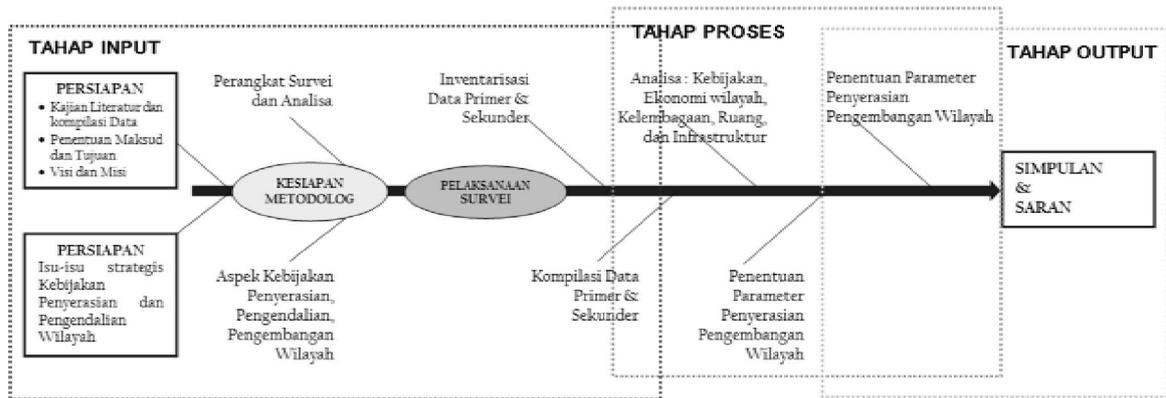
- a. Penetapan kebijakan Badan Kerjasama Antar Daerah (BKAD);
- b. Penetapan Kebijakan forum kerjasama antar daerah
- c. Penetapan kebijakan kerjasama antara Pemerintah Daerah dan swasta.
- d. Meningkatkan kerja sama dan kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan pengusaha dalam mengembangkan jaringan perdagangan demi pencapaian kemajuan perekonomian bangsa.
- e. Meningkatkan efektifitas program dan sinergi dengan program pembangunan daerah dalam rangka mengatasi keterbatasan alokasi dana APBN.
- f. Penetapan Kebijakan program-program pembangunan, diantaranya ;

### 4. Analisis Aspek Dokumen Penataan Ruang dan Infrastruktur Wilayah

Analisis ini digunakan untuk menentukan daerah yang paling baik untuk pengembangan kegiatan perkotaan tertentu. Faktor penentunya adalah semua aspek fisik lingkungan dari daerah perencanaan. Prinsipnya yang digunakan dalam analisis ini adalah untuk memperoleh lahan yang sesuai dengan kebutuhan perencanaan (kesesuaian lahan). Metode yang digunakan dalam analisis ini adalah superimposed (tumpang tindih) dari berbagai keadaan dari daerah perencanaan.

### 2.5. Research Frame Work

Adapun proses dan pentahapan dari kajian ini di visualisasikan dalam bentuk diagram alur berikut ini.



Gambar 1. Research Framework

### III. PEMBAHASAN DAN HASIL

#### 3.1 Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi

Alat analisis *Klassen Typology* (Tipologi Klassen) digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Tipologi Klassen pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan per kapita daerah. Melalui analisis ini diperoleh empat karakteristik pola dan struktur pertumbuhan ekonomi yang berbeda, yaitu: daerah cepat-maju dan cepat-tumbuh (*high growth and high income*), daerah maju tapi tertekan (*high income but low growth*), daerah berkembang cepat (*high growth but income*), dan daerah relatif tertinggal (*low growth and low income*).

Kriteria yang digunakan untuk membagi daerah kabupaten/kota adalah sebagai berikut: (1) daerah tumbuh cepat, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi; (2) daerah maju tapi tertekan atau tumbuh lambat, daerah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhannya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi; (3) daerah yang sedang berkembang, daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi; (4) daerah relatif tertinggal adalah daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dan pendapat per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi.

Penghitungan indeks Williamson digunakan untuk mengetahui tingkat ketimpangan pendapatan per kapita antara wilayah satu dengan wilayah yang lain. Dalam analisis ini, akan dihitung indeks Williamson untuk mengukur tingkat kesenjangan pendapatan per kapita antara wilayah-wilayah yang berada di suatu provinsi.

Tujuan akhir dari analisis dengan indeks Williamson adalah untuk mengukur homogenitas dari wilayah-wilayah kabupaten/kota tersebut.

#### A. Provinsi Nusa Tenggara Timur

##### 1. Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Timur

Tabel 1. Rasio PDRB per Kapita & Indeks PDRB Provinsi Nusa Tenggara Timur 2012

Kabupaten/Kota	PDRB/Kapita (Juta Rp/Jiwa)	Indeks PDRB	Rasio	
			PDRB/Kapita	Indeks PDRB
Sumba Barat	6.54	5.57	1.13	1.09
Sumba Timur	6.51	4.85	1.13	0.95
Kupang	6.92	4.09	1.20	0.80
Timor Tengah Selatan	5.07	4.23	0.88	0.83
Timor Tengah Utara	4.06	5.79	0.70	1.13
Belu	5.26	4.89	0.91	0.96
Alor	4.40	4.86	0.76	0.95
Lembata	3.47	4.70	0.60	0.92
Flores Timur	6.07	5.83	1.05	1.14
Sikka	5.61	4.46	0.97	0.87
Ende	6.54	5.30	1.13	1.04
Ngada	6.68	5.46	1.16	1.07
Manggarai	4.23	5.80	0.73	1.14
Rote Ndao	4.98	5.14	0.86	1.01
Manggarai Barat	4.69	3.14	0.81	0.61
Sumba Barat Daya	14.72	4.37	2.55	0.86
Sumba Tengah	1.04	3.73	0.18	0.73
Nagekeo	5.43	4.52	0.94	0.89
Manggarai Timur	3.43	4.47	0.59	0.88
Sabu Raijua	4.50	7.82	0.78	1.53
Kota Kupang	13.93	8.23	2.42	1.61
Nusa Tenggara Timur	5.77	5.11		

Sumber: Hasil Analisis 2012

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa untuk pasangan rasio PDRB/kapita dan rasio indeks PDRB  $\geq 1$  (keduanya sama-sama bernilai  $\geq 1$ ) adalah Kabupaten Sumba Barat, Flores Timur, Engde, Ngada, dan Kota Kupang. Wilayah yang memiliki rasio PDRB/kapita  $\geq 1$  dan rasio indeks PDRB  $\leq 1$  adalah Kabupaten Sumba Timur, Kupang, dan Kabupaten Sumba Barat Daya. Wilayah yang memiliki rasio PDRB/kapita  $\leq 1$  dan rasio indeks PDRB  $\geq 1$  adalah Kabupaten Timor Tengah Utara, Manggarai, Rote Ndao, dan Kabupaten Sabu Raijua.

Wilayah yang memiliki rasio PDRB/kapita dan rasio indeks PDRB  $\leq 1$  (keduanya sama-sama bernilai  $\leq 1$ ) adalah Kabupaten Timor Tengah Selatan, Belu, Alor, Lembata, Sikka, Manggarai Barat, Sumba Tengah, Nagekeo, dan Kabupaten Manggarai Timur.

**Tabel 2.** Analisis Tipologi Klassen Provinsi Nusa Tenggara Timur 2012

Rasio pertumbuhan PDRB sub region terhadap pertumbuhan PDRB region (Rasio indeks PDRB)	Rasio PDRB/kapita sub region terhadap PDRB/kapita	
	$\geq 1$	$\leq 1$
	$\geq 1$	wilayah tumbuh cepat – Kab. Sumba Barat, Kab. Flores Timur, Kab. Engda, Kab. Ngada, dan Kota Kupang.
$\leq 1$	wilayah lambat – Kab. Sumba Timur, Kab. Kupang, dan Kab. Sumba Barat Daya.	wilayah relatif tertinggal – Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Belu, Kab. Alor, Kab. Lembata, Kab. Sikka, Kab. Manggarai Barat, Kab. Sumba Tengah, Kab. Nagekeo, dan Kab. Manggarai Timur.

Sumber: Hasil Analisis 2012

Berdasarkan hasil analisis tipologi kelas, bahwa terdapat lima wilayah yang tumbuh cepat atau wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi. Terdapat empat wilayah yang sedang berkembang atau wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per-kapita lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi.

Terdapat empat wilayah yang tumbuh lambat atau wilayah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi. Dan sembilan wilayah yang relatif tertinggal atau wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi maupun pendapat per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih banyak wilayah kabupaten/kota yang perekonomiannya tumbuh relatif tertinggal.

## 2. Analisis Ketimpangan Regional Provinsi Nusa Tenggara Timur

Wilayah kabupaten/kota yang mempunyai kontribusi terbesar dalam menyumbangkan pendapatan regionalnya terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Kota Kupang dengan jumlah PDRB sebesar Rp 4.682.670,40 juta. Namun PDRB per kapita masih kalah dengan Kabupaten Sumba Barat Daya yang bersarnya mencapai Rp 14,72339 juta per kapita.

Wilayah dengan PDRB per kapita terendah adalah Kabupaten Sumba Tengah dengan hanya sebesar Rp 1,041307 juta per kapita. Hal ini dapat menunjukkan ketimpangan PDRB per kapita yang sangat besar. Namun berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson menunjukkan tidak terjadi disparitas/ketimpangan yang relatif besar. Untuk lebih jelasnya dapat melihat pada Tabel sebagai berikut.

**Tabel 3.** Indeks Williamson Provinsi Nusa Tenggara Timur 2012

Kabupaten/Kota	PDRB (Juta Rp)	PDRB per Kapita (Juta Rp/Jiwa)
Sumba Barat	725,634.56	6.537661
Sumba Timur	1,482,105.19	6.508111
Kupang	2,106,636.84	6.917257
Timor Tengah Selatan	2,235,199.11	5.066698
Timor Tengah Utara	932,943.66	4.059754
Belu	1,852,714.96	5.258958
Alor	835,919.91	4.398976
Lembata	408,489.91	3.466803
Flores Timur	1,411,553.01	6.068455
Sikka	1,685,952.90	5.613705
Ende	1,705,443.85	6.544172
Ngada	950,888.17	6.677914
Manggarai	1,236,464.90	4.227939
Rote Ndao	597,409.51	4.982232
Manggarai Barat	1,040,428.57	4.692894
Sumba Barat Daya	919,990.71	14.72339
Sumba Tengah	296,671.49	1.041307
Nagekeo	706,375.75	5.428649
Manggarai Timur	866,286.71	3.427526
Sabu Raijua	328,611.77	4.503999
Kota Kupang	4,682,670.40	13.92661
		<b>IW = 0.489939229</b>

Sumber: Hasil Analisis 2012

Dari hasil perhitungan Indeks Williamson (IW), ternyata dari semua wilayah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki nilai indeks mendekati 0 atau sebesar 0,489. Hal ini memperlihatkan, terlepas dari kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah dalam aspek kependudukannya, disparitas wilayah yang terjadi relatif kecil. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semua wilayah memiliki keunggulan komparatif yang relatif sama satu wilayah dengan wilayah lainnya.

## B. Provinsi Bali

### 1. Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

**Tabel 4.** Rasio PDRB per Kapita & Indeks PDRB Provinsi Bali 2012

Kabupaten/Kota	PDRB/Kapita (Juta Rp/Jiwa)	Indeks PDRB	Rasio	
			PDRB/Kapita	Indeks PDRB
Jembrana	13.21	4.56	0.72	0.78
Sumba Timur	11.72	5.64	0.64	0.97
Kupang	37.98	6.48	2.07	1.11
Timor Tengah Selatan	18.91	5.00	1.03	0.86
Timor Tengah Utara	40.80	5.00	2.23	0.86
Belu	10.90	4.97	0.59	0.85
Alor	17.24	5.00	0.94	0.86
Lembata	5.22	5.85	0.28	1.00
Flores Timur	23.88	6.57	1.30	1.13
<b>Bali</b>	<b>18.33</b>	<b>5.83</b>		

Sumber: Hasil Analisis 2012

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa untuk pasangan rasio PDRB/kapita dan rasio indeks PDRB  $\geq 1$  (keduanya sama-sama bernilai  $\geq 1$ ) adalah hanya terdapat pada Kab. Badung dan Kota Denpasar saja. Wilayah yang memiliki rasio PDRB/kapita  $\leq 1$  dan rasio indeks PDRB  $\geq 1$  hanya terdapat pada Kabupaten Gianyar dan Klungkung. Lalu empat wilayah sisanya merupakan wilayah yang memiliki rasio PDRB/kapita dan rasio indeks PDRB  $\leq 1$  (keduanya sama-sama bernilai  $\leq 1$ ), yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Bangli, & Karangasem. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini mengenai pengelompokan wilayah-wilayah amatan berdasarkan Tipologi Klassen.

**Tabel 5.** Analisis Tipologi Klassen Provinsi Bali 2012

	Rasio PDRB/kapita sub region terhadap PDRB/kapita	
	$\geq 1$	$< 1$
Rasio pertumbuhan PDRB sub region terhadap pertumbuhan PDRB region (Rasio indeks PDRB)	$\geq 1$	wilayah tumbuh cepat – Kab. Badung & Kota Denpasar
	$\leq 1$	wilayah lambat – Kab. Gianyar & Kab. Klungkung

Sumber: Hasil Analisis 2012

Berdasarkan hasil analisis tipologi kelas, bahwa terdapat hanya dua wilayah saja yang tumbuh cepat atau wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi. Terdapat hanya satu pula wilayah yang sedang berkembang atau wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi. Terdapat dua wilayah yang tumbuh lambat atau wilayah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi, dan empat wilayah sisanya yang terdapat di Provinsi DI Yogyakarta merupakan wilayah yang relatif tertinggal atau wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi maupun pendapat per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa di Provinsi Bali masih terjadi kesenjangan pola pertumbuhan ekonomi antar wilayah.

## 2. Analisis Ketimpangan Regional Provinsi Bali

Wilayah kabupaten/kota yang mempunyai kontribusi terbesar dalam menyumbangkan pendapatan regionalnya terhadap Provinsi Bali adalah Kabupaten Badung dengan jumlah PDRB sebesar Rp 14,926,782.41 juta. Namun PDRB per kapita terbesar terdapat pada Kabupaten Klungkung dengan PDRB per kapita Rp 47,46135 juta. Dari data PDRB per kapita di bawah dapat terlihat masih terjadi ketimpangan yang mencolok di antar wilayah di Provinsi Bali. Untuk lebih jelasnya dapat melihat pada Tabel sebagai berikut.

**Tabel 6.** Indeks Williamson Provinsi Bali 2012

Kabupaten/Kota	PDRB (Juta Rp)	PDRB per Kapita (Juta Rp/Jiwa)
Jembrana	3,604,140.00	13.2103
Tabanan	5,054,201.81	11.72201
Badung	14,926,782.41	37.9797
Gianyar	8,793,258.67	22.00185
Klungkung	8,793,258.67	47.46135
Bangli	2,351,365.45	10.89963
Karangasem	8,793,258.67	20.05418
Buleleng	3,457,475.66	5.215525
Denpasar	8,793,258.67	16.80351
<b>IW = 0.570862044</b>		

Sumber: Hasil Analisis 2012

Dari hasil perhitungan Indeks Williamson (IW), ternyata dari semua wilayah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Bali memiliki nilai indeks mendekati 1 atau sebesar 0,57. Hal ini memperlihatkan terjadinya disparitas wilayah yang relatif besar, terlepas dari kekurangan aspek dimiliki oleh masing-masing wilayah dalam aspek kependudukannya. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tidak semua wilayah memiliki keunggulan komparatif yang relatif sama satu wilayah dengan wilayah lainnya.

## C. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

### 1. Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DI Yogyakarta

**Tabel 7.** Rasio PDRB per Kapita & Indeks PDRB Provinsi DI Yogyakarta 2012

Kabupaten/Kota	PDRB/Kapita (Juta Rp/Jiwa)	Indeks PDRB	Rasio	
			PDRB/Kapita	Indeks PDRB
Kulonprogo	9.12	3.06	0.69	0.68
Bantul	9.96	4.97	0.75	1.10
Gunungkidul	11.32	4.15	0.86	0.92
Sleman	12.45	4.49	0.94	0.99
Yogyakarta	30.22	4.98	2.29	1.10
DI Yogyakarta	13.20	4.53		

Sumber: Hasil Analisis 2012

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa untuk pasangan rasio PDRB/kapita dan rasio indeks PDRB  $\geq 1$  (keduanya sama-sama bernilai  $\geq 1$ ) adalah hanya terdapat pada Kota Yogyakarta saja. Wilayah yang memiliki rasio PDRB/kapita  $\leq 1$  dan rasio indeks PDRB  $\geq 1$  hanya terdapat pada Kabupaten Bantul saja. Lalu tiga wilayah sisanya merupakan wilayah yang memiliki rasio PDRB/kapita dan rasio indeks PDRB  $\leq 1$  (keduanya sama-sama bernilai  $\leq 1$ ). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini mengenai pengelompokan wilayah-wilayah amatan berdasarkan Tipologi Klassen.

**Tabel 8.** Analisis Tipologi Klassen Provinsi DI Yogyakarta 2012

	Rasio PDRB/kapita sub region terhadap PDRB/kapita	
	$\geq 1$	$\leq 1$
Rasio pertumbuhan PDRB sub region terhadap pertumbuhan PDRB region (Rasio indeks PDRB)	$\geq 1$	wilayah tumbuh cepat – Kota Yogyakarta
	$\leq 1$	wilayah lambat – -

Sumber: Hasil Analisis 2012

Berdasarkan hasil analisis tipologi kelas, bahwa terdapat hanya satu wilayah saja yang tumbuh cepat atau wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita yang lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi. Terdapat hanya satu pula wilayah yang sedang berkembang atau wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi. Namun tidak terdapat wilayah yang tumbuh lambat atau wilayah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi, dan tiga wilayah sisanya yang terdapat di Provinsi DI Yogyakarta merupakan wilayah yang relatif tertinggal atau wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi maupun pendapat per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa di Provinsi DI Yogyakarta masih terjadi kesenjangan pola pertumbuhan ekonomi antar wilayah.

## 2. Analisis Ketimpangan Regional Provinsi DI Yogyakarta

Wilayah kabupaten/kota yang mempunyai kontribusi terbesar dalam menyumbangkan pendapatan regionalnya terhadap Provinsi DI Yogyakarta adalah Kabupaten Sleman dengan jumlah PDRB sebesar Rp 13,611,725 juta. Namun PDRB per kapita terbesarnya adalah Kota Yogyakarta dengan PDRB per kapita yang cukup besar dan sangat timpang di antara wilayah Kabupaten/Kota lainnya, yaitu Rp 30.21684 juta. Untuk lebih jelasnya dapat melihat pada Tabel sebagai berikut.

**Tabel 9.** Indeks Williamson Provinsi DI Yogyakarta 2012

Kabupaten/Kota	PDRB (Juta Rp)	PDRB per Kapita (Juta Rp/Jiwa)
Kulonprogo	3,547,055.00	9.121465
Bantul	9,076,000.00	9.957181
Gunungkidul	7,647,730.00	11.32356
Sleman	13,611,725.00	12.45229
Yogyakarta	11,743,079.00	30.21684
<b>IW = 0.433129101</b>		

Sumber: Hasil Analisis 2012

Dari hasil perhitungan Indeks Williamson (IW), ternyata dari semua wilayah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi DI Yogyakarta memiliki nilai indeks mendekati 0 atau sebesar 0,433. Hal ini memperlihatkan disparitas wilayah yang terjadi relatif kecil, terlepas dari kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah dalam aspek kependudukannya. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa semua wilayah memiliki keunggulan komparatif yang relatif sama satu wilayah dengan wilayah lainnya.

## D. Provinsi Sulawesi Selatan

### 1. Analisis Pola Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan

**Tabel 10.** Rasio PDRB per Kapita & Indeks PDRB Provinsi Sulawesi Selatan 2012

Kabupaten/Kota	PDRB/Kapita (Juta Rp/Jiwa)	Indeks PDRB	Rasio	
			PDRB/Kapita	Indeks PDRB
Kep. Selayar	3.79	8.01	0.59	0.96
Bulukumba	4.42	6.27	0.69	0.75
Bantaeng	4.23	7.90	0.66	0.95
Jeneponto	2.60	7.25	0.41	0.87
Takalar	3.38	6.86	0.53	0.82
Gowa	2.89	6.05	0.45	0.72
Sinjai	4.75	6.02	0.74	0.72
Maros	3.61	7.03	0.57	0.84
Pangkep	8.24	6.34	1.29	0.76
Barru	4.38	6.01	0.69	0.72
Bone	4.48	7.63	0.70	0.91
Soppeng	5.40	4.45	0.85	0.53
Wajo	6.36	5.71	1.00	0.68
Sidrap	5.61	4.45	0.88	0.53
Pinrang	7.21	6.23	1.13	0.75
Enrekang	3.95	5.00	0.62	0.60
Luwu	5.09	6.95	0.80	0.83
Tana Toraja	3.00	6.27	0.47	0.75
Luwu Utara	5.33	5.93	0.84	0.71
Luwu Timur	20.31	16.15	3.18	1.93
Toraja Utara	3.17	7.00	0.50	0.84
Makassar	12.14	9.83	1.90	1.18
Pare Pare	5.93	8.47	0.93	1.01
Palopo	6.25	7.29	0.98	0.87
SULSEL	<b>6.38</b>	<b>8.35</b>		

Sumber: Hasil Analisis 2012

Dari Tabel di atas, terlihat bahwa untuk pasangan rasio PDRB/kapita dan rasio indeks PDRB  $\geq 1$  (keduanya sama-sama bernilai  $\geq 1$ ) adalah hanya terdapat pada Kota Makassar dan Kabupaten Luwu Timur saja. Wilayah yang memiliki rasio PDRB/kapita  $\geq 1$  dan rasio indeks PDRB  $\leq 1$  adalah Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Pinrang. Wilayah yang memiliki rasio PDRB/kapita  $\leq 1$  dan rasio indeks PDRB  $\geq 1$  hanya terdapat pada Kota Pare Pare saja. Lalu sisanya atau sebagian besar wilayah yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang memiliki rasio PDRB/kapita dan rasio indeks PDRB  $\leq 1$  (keduanya sama-sama bernilai  $\leq 1$ ). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini mengenai pengelompokan wilayah-wilayah amatan berdasarkan Tipologi Klassen.

**Tabel 11.** Analisis Tipologi Klassen Provinsi Sulawesi Selatan 2012

	Rasio PDRB/kapita sub region terhadap PDRB/kapita	
	$\geq 1$	$\leq 1$
Rasio pertumbuhan PDRB sub region terhadap pertumbuhan PDRB region (Rasio indeks PDRB)	$\geq 1$	wilayah tumbuh cepat – Kota Makassar dan Kab. Luwu Timur
	$\leq 1$	wilayah berkembang – Kota Pare Pare
		wilayah relatif tertinggal – Kep. Selayar, Bulukumba, Bantaeng, Jeneponto, Takalar, Gowa, Sinjai, Maros, Barru, Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Enrekang, Luwu, Tana Toraja, Luwu Utara, Toraja Utara, Palopo.

Sumber: Hasil Analisis 2012

Berdasarkan hasil analisis tipologi kelas, bahwa terdapat dua wilayah yang tumbuh cepat atau wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita yang lebih

tinggi dibanding rata-rata Provinsi. Terdapat hanya satu wilayah yang sedang berkembang atau wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan tinggi, tetapi tingkat pendapatan per kapita lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi. Terdapat dua wilayah yang tumbuh lambat atau wilayah yang memiliki pendapatan per kapita lebih tinggi, tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi, dan Sembilan belas wilayah sisanya yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan merupakan wilayah yang relatif tertinggal atau wilayah yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi maupun pendapatan per kapita yang lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi. Sehingga dapat dikatakan bahwa di Provinsi Sulawesi Selatan masih terjadi kesenjangan pola pertumbuhan ekonomi antar wilayah.

## 2. Analisis Ketimpangan Regional Provinsi Sulawesi Selatan

Wilayah kabupaten/kota yang mempunyai kontribusi terbesar dalam menyumbangkan pendapatan regionalnya terhadap Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kota Makassar dengan jumlah PDRB sebesar Rp 16.252.450 juta. Namun PDRB per kapita terbesar terdapat di Kabupaten Luwu Timur dengan jumlah PDRB per kapita sebesar Rp 20.310.730 jauh meninggalkan wilayah-wilayah Kabupaten/kota lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat melihat pada Tabel sebagai berikut.

**Tabel 12.** Indeks Williamson Provinsi Sulawesi Selatan 2012

Kabupaten/Kota	PDRB (Juta Rp)	PDRB per Kapita (Juta Rp/Jiwa)
Kep. Selayar	463,010.00	3.793454
Bulukumba	1,742,030.00	4.415121
Bantaeng	746,910.00	4.227019
Jeneponto	891,010.00	2.599971
Takalar	910,630.00	3.37767
Gowa	1,890,030.00	2.894641
Sinjai	1,086,670.00	4.747793
Maros	1,153,180.00	3.614962
Pangkep	2,519,980.00	8.242313
Barru	726,210.00	4.375207
Bone	3,213,090.00	4.477039
Soppeng	1,207,980.00	5.39696
Wajo	2,449,060.00	6.359394
Sidrap	1,524,360.00	5.606099
Pinrang	2,532,740.00	7.213358
Enrekang	751,810.00	3.951737
Luwu	1,691,510.00	5.087524
Tana Toraja	662,320.00	2.995825
Luwu Utara	1,533,360.00	5.333946
Luwu Timur	4,936,910.00	20.31073
Toraja Utara	686,870.00	3.168775
Makassar	16,252,450.00	12.14081
Pare Pare	767,160.00	5.934923
Palopo	925,080.00	6.253414
<b>IW = 0.703450926</b>		

Sumber: Hasil Analisis 2012

Dari hasil penghitungan Indeks Williamson (IW), ternyata dari semua wilayah kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Sulawesi Selatan memiliki nilai indeks mendekati 1 atau sebesar 0,703. Hal ini memperlihatkan terjadinya disparitas wilayah yang relatif besar, terlepas dari kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing wilayah dalam aspek kependudukannya. Atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa tidak semua wilayah memiliki keunggulan komparatif yang relatif sama satu wilayah dengan wilayah lainnya.

## 3.2 Analisis Dokumen Perencanaan

### A. Dokumen Rencana Jangka Menengah Daerah

Dilihat berdasarkan studi dokumen RPJMD Provinsi NTT, Bali, DIY dan Sulawesi Selatan beberapa hal yang menjadi isu dalam penyerasian adalah :

1. Visi dan Misi menggambarkan *value* atau nilai-nilai yang menjadi ciri ideologi dalam melaksanakan pembangunan, selain itu juga mengandung *desire* atau keinginan sebagai faktor pendorong dalam mencapai harapan yang di inginkan. Di dalamnya juga mengandung *process* atau aktivitas bergerak maju mencapai harapan dalam visi dan misi dan *concensus* atau mengandung kesepakatan-kesepakatan antar *stake holders* dalam pembangunan. Maka pencapaian ini RPJM harus berlandaskan pada penggambaran tahap demi tahap pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan pada masa yang akan datang.
2. Dalam upaya penyerasian dokumen RPJM belum semua menggambarkan tingkat pencapaian ditunjukkan dengan tingkat ketercapaian baik secara kualitatif dan kuantitatif. Tingkat pencapaian ini sangat penting untuk upaya-upaya yang harus secara konsisten di laksanakan oleh Pemerintah Daerah dan memudahkan untuk melakukan evaluasi sebagai bagian dari pengendaliannya.
3. Dokumen RPJM perlu juga menggambarkan aspek lokasi dalam pencapaian sasaran dan lokasi yang perlu ditangani secara bertahap atau dengan cara prioritas. Dengan demikian akan terjadi sinkronisasi dengan RTRW baik Provinsi atau Kabupaten untuk penanganan kawasan-kawasan yang perlu ditangani tidak saja pada aspek ruang tetapi juga melalui RPJM. Sebagai contoh sasaran agenda pembangunan pada RPJM adalah Menurunnya angka Kemiskinan pada tahun 2013 dari 20% menjadi 15% maka penting juga aspek lokasi seperti sebaran desa miskin yang perlu ditangani melalui prioritas baik pembangunan sosial maupun ekonomi. Hal

ini juga akan terlihat sinkronisasinya terhadap pencapaian pada rencana tata ruang terkait rencana infrastruktur dan pola ruang/pemanfaatan ruangnya.

4. Setelah melakukan review dokumen RPJM, dokumen RPJM pada umumnya tidak menggambarkan pencapaian berdasarkan Tipologi Wilayah yang perlu untuk ditangani. Sehingga pencapaian setelah dilakukan evaluasi adalah merupakan pencapaian agregat bukan merupakan pencapaian kewilayahan.

Ditinjau berdasarkan arahan pencapaian dapat dideskripsikan berdasarkan tinjauan melalui 2 Pendekatan yaitu pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dimaksud adalah RPJMD menggambarkan arah pencapaian melalui deskripsi kehendak yang ingin dicapai dalam pembangunan daerahnya. Sedangkan dimaksud dengan pencapaian RPJMD melalui pendekatan kuantitatif adalah bahwa daerah memiliki kehendak untuk pencapaian pembangunan melalui pendekatan numerik/angka-angka yang ingin diraih dalam melaksanakan pembangunan daerahnya.

Selanjutnya yang menjadi orientasi arah pencapaian selanjutnya adalah arah pencapaian RPJMD berbasis lokasi dan berbasis tipologi daerah. Ini sangat penting karena kebijakan pembangunan adalah tidak hanya meningkatkan pembangunan berdasarkan kualitatif dan kuantitatif dimaksud tetapi juga berdasarkan kewilayahannya. Berbasis lokasi dimaksud adalah bahwa arah pencapaian pembangunan hendaknya menunjukkan lokasi/atau tempat dan sebaran bagian dari wilayah yang akan di tangannya. Dengan demikian kebijakan pembangunan dapat lebih mudah, serasi dan terkendali sesuai dengan rentang tahun program penanganannya berdasarkan skala prioritas.

Pendekatan berbasis tipologi daerah dimaksud dalam penelaahan dokumen RPJMD adalah satuan wilayah memiliki karakteristis yang berbeda antara satu dengan yang lainnya baik secara fisik geografis, sosial ekonomi, kependudukan dan sosial masyarakatnya. Oleh sebab itu diperlukan skala prioritas pembangunan wilayah yang disesuaikan dengan tipologi wilayah sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara bertahap dan terkendali.

Berdasarkan hasil analisis dokumen RPJMD Arah Pencapaian Pembangunan meliputi pada umumnya meliputi 12 bidang pembangunan meliputi [1] Pembangunan Pendidikan, [2] Pembangunan Kesehatan, [3] Pembangunan Ekonomi, [4] Pembangunan Infrastruktur, [5] Pembenahan sistem hukum (daerah) dan keadilan, [6] Konsolidasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, [7] Aparatur Negara, [8] Pemberdayaan

Perempuan, Anak dan Pemuda, [9] Penanggulangan kemiskinan, [10] Pembangunan daerah perbatasan, [11] Pembangunan Daerah Kepulauan, [12] Pembangunan Daerah Rawan Bencana. Bidang-bidang pembangunan ini ditinjau berdasarkan pendekatan kualitatif, kuantitatif, basis lokasi dan tipologi dari ke empat provinsi sangat bervariasi. Adapun hasil analisis tersebut adalah sebagai berikut :

[1] Pembangunan Pendidikan, pembangunan pendidikan di setiap provinsi sangatlah penting bagi pembangunan sumberdaya manusia. Hampir semua dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan telah mendeskripsikan arah pembangunan pendidikan berikut prioritas pembangunan dengan jangka waktu yang telah ditentukan berdasarkan rentang waktu RPJMD.

Pencapaian angka-angka pada tiap tahun perencanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan telah di jelaskan secara terperinci. Namun Demikian tidak menunjukkan lokasi dan sebarannya secara visualisasi disamping itu juga tidak menunjukkan prioritas pembangunan yang di jelaskan atau digambarkan berdasarkan tipologi pembangunan pendidikan. Mengenal Tipologi ini juga sangat penting untuk mendukung sistem keputusan dan tindakan emergency dalam mendongkrak pembangunan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

[2] Pembangunan Kesehatan, pembangunan kesehatan RPJMD provinsi yang menyangkut core pembangunan kesehatan meliputi ketersediaan infrastruktur kesehatan, kelembagaan kesehatan dan pelayanan kesehatan. Berdasarkan studi dokumentasi RPJMD pada keempat provinsi yang diamati baik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan telah menetapkan arah pembangunannya strategis menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kuantitatif berkaitan dengan arah pembangunan dengan menunjukkan arah dan tujuan pembangunan dengan angka pencapaian yang diharapkan telah di tunjukkan pula pada dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan kecuali Provinsi Bali hanya menggunakan pendekatan kualitatif yang hanya menggunakan pencapaian-pencapaian arah pembangunan berdasarkan deskriptif.

Untuk pembangunan menggunakan pendekatan berbasis lokasi dan tipologi wilayah ke empat RPJMD provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan belum memasukan aspek wilayah dalam mendukung sistem keputusan pada Kebijakan Pembangunannya.

[3] Pembangunan Ekonomi, pembangunan ekonomi pada RPJMD provinsi yang menyangkut core yang membangun struktur ekonomi daerah meliputi ketersediaan infrastruktur ekonomi, pola kegiatan ekonomi dan bisnis dan struktur ekonomi daerah. Berdasarkan studi dokumentasi RPJMD pada keempat provinsi yang diamati baik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan telah menetapkan arah pembangunannya strategis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif berkaitan dengan arah pembangunan dengan menunjukkan arah dan tujuan pembangunan dengan angka pencapaian yang diharapkan telah di tunjukkan pula pada dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan kecuali Provinsi Bali hanya menggunakan pendekatan kualitatif yang hanya menggunakan pencapaian-pencapaian arah pembangunan berdasarkan deskriptif. Untuk bidang pembangunan menggunakan pendekatan berbasis lokasi dan tipologi wilayah ke empat RPJMD provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan belum memasukan aspek wilayah dalam mendukung sistem keputusan pada Kebijakan Pembangunannya.

[4] Pembangunan Infrastruktur, pembangunan infrastruktur RPJMD provinsi yang menyangkut core infrastruktur dasar meliputi ketersediaan infrastruktur kesehatan, jumlah dan pelayanan infrastruktur itu sendiri. Berdasarkan studi dokumentasi RPJMD pada keempat provinsi yang diamati baik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan telah menetapkan arah pembangunan infrastruktur strategis menggunakan pendekatan kualitatif yang sulit untuk diukur akuntabilitasnya dan pencapaiannya.

[5] Pembenahan sistem hukum (daerah) dan keadilan, bidang pembangunan sistem hukum dan keadilan merupakan berlandaskan pada sistem sosial masyarakat. sistem sosial ini memerlukan perangkat-perangkat hukum yang baik dalam menjalankan pemerintahan. Disamping itu juga bidang pembangunan ini adalah untuk menjamin demokratisasi dan peningkatan pemerataan sosial dalam pembangunan. Berdasarkan studi dokumentasi RPJMD pada keempat provinsi yang diamati baik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan telah menetapkan upaya-upaya pembenahan sistem hukum dan keadilan dalam arahan strategis menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kuantitatif berkaitan menunjukkan arah dan tujuan pembangunan dengan menggunakan angka pencapaian seperti jumlah peraturan daerah pada saat ini dan yang akan direalisasikan telah tercantum pula pada dokumen

RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan kecuali Provinsi Bali hanya menggunakan pendekatan kualitatif yang hanya menggunakan pencapaian-pencapaian arah pembangunan berdasarkan deskriptif. Aspek lokasi dalam pembenahan sistem hukum mungkin tidak terlalu signifikan dalam mendukung keputusan tetapi hal ini akan memudahkan daerah dalam memberikan visualisasi sebaran daerah atau lokasi yang perlu dibenahi serta memberikan gambaran tipologi aspek hukum secara kewilayahan.

[6] Konsolidasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, pada RPJMD provinsi yang menyangkut 3 hal penting dalam tata ruang dan lingkungan hidup adalah perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian. Berdasarkan hal tersebut pencapaian pada saat ini pada bidang tata ruang dan lingkungan hidup merupakan optimasi ruang terhadap pembangunan daerah/wilayah serta nilai pertimbangan bagi kelangsungan hidup (lingkungan). Sebagaimana tercantum pada Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang bahwa tiap satuan wilayah harus memiliki rencana tata ruang berdasarkan penjabaran rencana wilayah dalam bentuk RDTR dan RTR lainnya dengan substansi lebih detail. Berdasarkan studi dokumentasi RPJMD pada keempat provinsi yang diamati baik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan telah menetapkan arah pembangunannya strategis menggunakan pendekatan kualitatif.

Pendekatan kuantitatif berkaitan dengan arah pembangunan dengan menunjukkan arah dan tujuan pembangunan dengan angka pencapaian yang diharapkan telah di tunjukkan pula pada dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan kecuali Provinsi Bali hanya menggunakan pendekatan kualitatif yang hanya menggunakan pencapaian-pencapaian arah pembangunan berdasarkan deskriptif.

Untuk bidang pembangunan menggunakan pendekatan berbasis lokasi dan tipologi wilayah pembangunan ke empat dokumen RPJMD provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan belum memasukan aspek wilayah dalam mendukung sistem keputusan pada Kebijakan Pembangunannya.

[7] Aparatur Negara, Berdasarkan studi dokumentasi RPJMD pada keempat provinsi yang diamati baik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan telah menetapkan arah pembangunan aparatur negara menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif berkaitan dengan arah pembangunan dengan menunjukkan arah dan tujuan pembangunan dengan angka pencapaian

yang diharapkan telah ditunjukkan pula pada dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan kecuali Provinsi Bali hanya menggunakan pendekatan kualitatif yang hanya menggunakan pencapaian-pencapaian arah pembangunan berdasarkan deskriptif.

[8] Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Pemuda, berdasarkan studi dokumentasi RPJMD pada keempat provinsi yang diamati baik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan telah menetapkan arah pembangunan infrastruktur strategis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif berkaitan dengan arah pembangunan dengan menunjukkan arah dan tujuan pembangunan dengan angka pencapaian yang diharapkan telah di tunjukkan pula pada dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan kecuali Provinsi Bali hanya menggunakan pendekatan kualitatif yang hanya menggunakan pencapaian-pencapaian arah pembangunan berdasarkan deskriptif.

[9] Penanggulangan kemiskinan, pembangunan kemiskinan merupakan penanganan pembangunan pada 3 hal pokok meliputi [1] Kantong-kantong kemiskinan, [2] disparitas wilayah dan [3] perluasan ekonomi masyarakat terutama pada sektor riil. Selanjutnya di sisi kewilayahan terkait dengan; [1] Kantong-kantong kemiskinan, [2] disparitas wilayah dan [3] perluasan ekonomi. RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan belum menunjukkan gambaran mengenai sebaran kemiskinan dan prioritas penanganan kemiskinannya berdasarkan lokasi. Disamping itu RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan belum dapat menunjukkan visualisasi yang menjadi acuan bagi pendukung keputusan mengenai tipologi kemiskinan di daerahnya.

[10] Pembangunan daerah perbatasan, pembangunan perbatasan secara administratif terbedakan antara perbatasan antar negara dan perbatasan antara provinsi. Baik perbatasan antar pulau maupun perbatasan antar provinsi permasalahan utama terletak pada kegiatan ekonomi masyarakatnya. Tarik menarik antar wilayah menyebabkan adanya perubahan pola perekonomian yang saling mempengaruhi seperti adanya *backwash effect* terutama bagi wilayah berbatasan miskin. Hal ini menjadi pertimbangan bagi perubahan paradigma dimana perbatasan merupakan harus menjadi halaman bukan menjadi daerah terbelakang dari suatu wilayah. Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan telah mendeskripsikan arahan kebijakannya. Sedangkan

mengenai arahan bagi angka-angka pencapaian pembangunan wilayah perbatasan hanya RPJMD Provinsi Bali yang belum tercantum dalam dokumen RPJMD.

[11] Pembangunan Daerah Kepulauan, terutama bagi provinsi yang memiliki kepulauan.

[12] Berdasarkan dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan telah mendeskripsikan arahan kebijakannya bagi daerah rawan bencana. Sedangkan mengenai arahan bagi angka-angka pencapaian meminimalisasi resiko dan dampak bencana/disaster, hanya RPJMD Provinsi Bali yang belum tercantum dalam dokumen RPJMD. Sisi lain secara spatial adalah basis lokasi dan tipologi bencana, semua dokumen RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bali, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sulawesi Selatan belum menggambarkannya sebagai pendukung keputusan dalam kebijakan pembangunan daerahnya khususnya dalam keadaan darurat/*emergency*.

## B. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi

Jika dilihat berdasarkan analisis spatial bahwa rencana struktur ruang wilayah dari ke 4 (empat) provinsi sudah dalam kategori serasi, serta memuat pertimbangan pada kutub-kutub wilayah dengan prinsip pemerataan. Hal yang penting setelah diadakan review adalah ketidak adanya sinkronisasi dengan dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJP dan RPJM dimana arah pembangunan dan sasarannya tidak terintegrasi dengan ruang atau masih mengandalkan pada peningkatan agregat.

Rencana pola ruang wilayah provinsi, terdiri dari pola ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Rencana pola ruang menggambarkan kebijakan letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung dalam wilayah provinsi. Rencana pola ruang wilayah provinsi meliputi ruang daratan serta ruang laut dalam batas 12 mil laut dari daratan terjauh di provinsi. Pola ruang wilayah provinsi meliputi pola ruang **kawasan lindung** dan **kawasan budidaya**.

**Kawasan lindung provinsi** adalah kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota, atau kawasan lindung dalam wilayah suatu kabupaten yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain, atau kawasan-kawasan lindung lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi.

**Kawasan budi daya yang memiliki nilai strategis provinsi** adalah kawasan budi daya yang dipandang sangat penting bagi upaya pencapaian

pembangunan provinsi dan/atau menurut peraturan perundang-undangan dimana perizinan dan/atau pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

Kawasan lindung di wilayah provinsi yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi, mencakup:

- Kawasan lindung nasional sesuai dengan yang ditetapkan dalam RTRWN dan RTRW Pulau;
- Kawasan lindung yang secara ekologis merupakan satu ekosistem yang terletak lebih dari satu wilayah kabupaten/kota;
- Kawasan lindung yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang terletak di wilayah kabupaten/kota lain;
- Kawasan lindung provinsi yang wewenang pengembangan dan pengelolaannya berada pada Pemerintah Provinsi, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku
- Kawasan lindung spiritual dan kearifan lokal

Kawasan budidaya yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi, mencakup:

- Kawasan budidaya strategis nasional, sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam RTRWN dan RTRW Pulau;
- Kawasan budi daya yang berperan penting dalam upaya pencapaian pembangunan provinsi;
- Kawasan budi daya yang merupakan kewenangan pemerintahan provinsi berdasarkan peraturan perundangan; dan
- kawasan strategis provinsi yang penetapan, pengembangan, dan pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintahan provinsi.

Baik kawasan lindung maupun kawasan budidaya keduanya merupakan kawasan yang paling rentan terhadap ketidakserasian dan ketidak terkendalian dalam pemanfaatan ruang pada tingkat implementasinya.

### 3.3 Kebijakan Pengembangan Wilayah Nasional

Dalam konteks pengembangan wilayah, arahnya untuk **mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan** melalui:

- a. Pengembangan wilayah diselenggarakan dengan **memerhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya darat dan/atau laut di setiap wilayah**, serta memerhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan
- b. **Percepatan pembangunan dan pertumbuhan wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh yang didorong**

**sedemikian rupa sehingga dapat mengembangkan wilayah-wilayah tertinggal di sekitarnya** dalam suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang sinergis, tanpa mempertimbangkan batas wilayah administrasi, tetapi lebih ditekankan pada pertimbangan keterkaitan mata-rantai proses industri dan distribusi

Terjadinya konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada wilayah tertentu jelas akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pertumbuhan ekonomi daerah akan cenderung lebih cepat pada daerah di mana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Konsentrasi kegiatan ekonomi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Adapun Indikator dan Parameter dalam Aspek Infrastruktur untuk penyerasian pengembangan wilayah terdapat :

- a. Penyebaran Jaringan Jalan di suatu wilayah berhirarki. Infrastruktur jalan sebagai akses aktifitas masyarakat menjadi urat nadi kegiatan perekonomian daerah, daerah terpencil dan tertinggal salah satunya masih lemahnya akses jalan ke pelosok. Keserasian akan diukur dengan pola penyebaran jalan berhirarki yang semakin besar ke berbagai daerah, dimana mayoritas daerah terpencil mendapatkan akses jalan mencapai 80% .
- b. Penyebaran jaringan kelistrikan berhirarki Infrastruktur jaringan listrik juga menjadi salah satu faktor kendala pengembangan daerah, khususnya daerah tertinggal dan terpencil. Keserasian dapat dilihat dari prosentasi listrik pedesaan mencapai >70%.

#### A. Sumber Daya Alam

Penyebab yang mendorong timbulnya ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah adanya perbedaan yang sangat besar dalam kandungan sumberdaya alam pada masing-masing daerah. Perbedaan kandungan sumberdaya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumberdaya alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Adapun Indikator dan Parameter dalam Aspek Sumber Daya Alam untuk penyerasian pengembangan wilayah adalah :

#### (1) Penyebaran dan Konsentrasi potensi sumber daya alam

Secara alami terdapat beberapa daerah yang mendapat konsentrasi kandungan alam yang potensial. Kategori sumber daya alam menjadi keunggulan komparatif daerah , karena akan mendatangkan minat investor , sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penyerasian pengembangan wilayah ini adalah tingkat

penyebaran potensi SDA yang potensial disuatu wilayah.

## (2) Tingkat pembagian dan distribusi hasil sumber daya alam

Selain potensi sumber daya alam yang given, maka fungsi pemerataan dan pembagian hasil sumber daya alam menjadi salah satu kebijakan penyerasian pengembangan wilayah, pembagian atau share dapat berbentuk klaster pengelolaan SDA kedalam industri, maka bila ada klaster industri pengolahan SDA dalam suatu kawasan, maka keserasian pengembangan wilayah akan terjadi.

## B. Sumber Daya Manusia

Dinamika dan perubahan pada aspek sumber daya manusia di suatu daerah merupakan salah satu konstruksi penting dalam mengamati pembangunan wilayah. Disatu sisi SDM merupakan *dependent variable* dari suatu proses pembangunan dan pengembangan masyarakat baik yang direncanakan maupun yang tidak. Dan disisi lain SDM menjadi *independent variable* terhadap perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Oleh karena itu aspek Sumber Daya Manusia menjadi penting dalam konteks pembangunan wilayah, dan salah satu indikator terkait dengan potensi sumber daya manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai perwujudan dari 3 dimensi pokok dalam pemberdayaan masyarakat yakni peluang hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowlegde*) dan hidup yang layak (*decent living*). Makin tinggi IPM suatu wilayah, maka terdapat kecenderungan makin berkembangnya suatu wilayah dan sebaliknya.

## C. Anggaran

Dalam anggaran prinsipnya mencakup 2 sisi, yakni aspek pendapatan (*revenue side*) dan aspek pengeluaran (*expenditure side*) yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan Dan Pengeluaran daerah (APBD). Untuk aspek pendapatan yang penting adalah berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini sebagian besar pemda menghadapi persoalan dilematis, dimana disatu pihak adanya tuntutan peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik, sementara itu jumlah anggaran yang ada sangat terbatas seperti yang tercermin dalam PAD.

Dalam konteks pengembangan wilayah, adapun Indikator dan Parameter dalam Aspek Infrastruktur untuk keserasian pengembangan wilayah adalah :

### (1) Disparitas Kontribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Daerah yang maju pada umumnya sebagai kontributor terbesar penyumbang PAD, sektor pertambangan dan industri juga menjadi sektor terbesar penyumbang PAD. Keserasian

pengembangan wilayah akan dilihat dari disparitas kontribusi daerah terhadap PAD, semakin tinggi artinya kemampuan daerah tidak merata begitu juga sebaliknya.

### (2) Prosentasi Alokasi Anggaran untuk Wilayah Tertinggal

Peran pemerintah dalam mengurangi kesenjangan sangat tinggi, dengan adanya subsidi, prioritas, alokasi anggaran yang lebih besar kepada daerah tertinggal menjadi salah satu indikator keserasian pengembangan wilayah.

## D. Aspek Kelembagaan

Peranan pemerintah sebagai penyelenggara Negara menjadi titik sentral keberhasilan pembangunan, sehingga proses pengambilan kebijakan harus didasarkan atas semua kepentingan secara komprehensif dengan asas kesejahteraan dan pemerataan pembangunan. Terdapat dua unsur penting dalam aspek kelembagaan yaitu :

- (1) *Aspek Struktural (Hirarki)*, bahwa pengembangan wilayah harus adanya paduserasi antara rencana pada tingkat pusat, propinsi dan kabupaten/kota. Perencanaan fihak pusat yang didasarkan kepada lingkup nasional harus diadopsi oleh pemerintah propinsi kedalam program pengembangan wilayah yang kemudian menjadi program setiap kabupaten/kota.
- (2) *Aspek Fungsional (Lintas Sektoral)*, perbedaan kepentingan dan pengembangan sektoral harus diserasikan, karena karakteristik pengembangan yang berbeda akan mengakibatkan konflik, seperti pengembangan sektor pariwisata dengan sektor pertanian, sektor pertambangan dengan sektor kehutanan.

Secara umum terdapat empat permasalahan yang timbul dalam menjalankan suatu lembaga yang terkait dengan perilaku kelembagaan, yakni:

- Ketidakefektifan dalam menjalankan organisasi yang timbul karena kegagalan para penyelenggara organisasi dalam menjalankan misinya.
- Ketidakefisienan yang timbul karena tingkat rasio antara dana yang diperoleh dan dikumpulkan dengan pengembaliannya kedalam bentuk berbagai kebijakan masih sangat rendah karena pengeluaran-pengeluaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
- *Private instrumen*, dimana pihak-pihak yang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pembangunan masih mementingkan kelompok-kelompok tertentu sehingga mereka bekerja tidak obyektif dan independen.

- *Excessive risk* yang terjadi bila instansi pemerintah menggunakan dana milik negara untuk kegiatan yang memiliki resiko sangat tinggi dan tidak sesuai dengan yang dikemukakan saat pengajuan anggaran.

### 3.4 Arahan Bagi Kebijakan Penyerasian dan Pengendalian Pengembangan Wilayah

Dengan adanya sinergis pembangunan dan pengembangan wilayah akan menjadi lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaan, tidak banyak ketimpangan – ketimpangan yang muncul dari sisi pengambilan keputusan dalam bentuk kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah.

#### A. Arah Kebijakan Penyerasian Dan Pengendalian Pengembangan Wilayah

Diharapkan kedepan dengan adanya pedoman ini akan memberikan arah yang jelas dengan menjawab visi dan misi kementerian dalam negeri yaitu :

##### (1) Mengurangi Kesenjangan Antar Daerah

Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) yang didalam laporan-laporan ekonomi daerah selalu menjadi indikator utama ekonomi daerah dapat menyedatkan kita, karena PDRB hanya menunjukkan tingkat penghasilan daerah, dan bukan menggambarkan pendapatan riil yang diterima daerah. Hal ini karena *multiplier interregional* lebih kuat dibandingkan dengan *multiplier intraregional* sebagai akibat “kebocoran” dalam bentuk pajak, impor dan tabungan sehingga uang tersebut lebih banyak keluar daerah.

##### (2) Meningkatkan konektivitas antar daerah

Kebijakan pembangunan wilayah tidak terlepas dari kerangka sistem kota-kota dalam suatu daerah. Apabila kota-kota dalam sistem perencanaan tidak mempunyai sistem yang hirarkhis berdasarkan peringkat kota dan kurang terintegrasi dalam suatu sistem, maka akan memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi kota dan wilayah belakangnya (*hinterland*). Kondisi semacam ini lebih lanjut akan menciptakan adanya pengkutuban atau polarisasi pembangunan yang menyebabkan kesenjangan antar wilayah

##### (3) Mendorong Pertumbuhan Kawasan

Dasar pemikiran dari paket kebijakan ekonomi regional adalah kemampuan daerah untuk membaca kecenderungan daerah dan daerah lainnya mengingat akan meningkatnya perdagangan inter-regional, mobiltas modal dan tenaga kerja dan sebagainya, maupun kemampuan untuk membaca kecenderungan nasional serta merefleksikan keinginan dunia yang tercermin dari berbagai masalah, kekuatan, tantangan dan kendala serta peluang yang dihadapi daerah ini.

Kebijakan ini juga dibuat mengingat persaingan yang makin ketat antar daerah, dan dampak globalisasi/persaingan bebas yang dihadapi daerah serta mengantisipasi kemungkinan fluktuasi ekonomi sektoral, yang pada akhirnya kebijakan ini dapat memberikan **kesempatan kerja bagi masyarakat** dan juga menghasilkan fundamental ekonomi yang kuat bagi daerah untuk jangka panjang.

#### B. Target Kebijakan Penyerasian Dan Pengendalian Pengembangan Wilayah

##### (1) Terciptakan kebijakan-kebijakan yang terintegrasi oleh pemerintah daerah yang reliabel.

Keberhasilan dan peranan pemerintah dalam membuat kebijakan yang terintegrasi artinya mampu mengakomodir kepentingan pusat, propinsi dan daerah sehingga kebijakan tersebut mempunyai kehandalan yang tinggi dalam jangka waktu tertentu menjadi pedoman yang baku , dikarenakan tidak menciptakan konflik kelembagaan dan kepentingan pengelolaan.

##### (2) Iklim kelembagaan pemerintah daerah yang harmonis baik secara struktural dan fungsional sehingga meningkatkan kinerja pemerintah.

Kerjasama antara pengelola dan stakeholder yang baik dan harmonis merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan daerah dalam membentuk sinergitas kelembagaan pemerintah pusat dan daerah , akan memberikan umpan balik yang tinggi , pertukaran knowledge dan informasi yang lancar.

## IV. SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal point penting sebagai dimensi dan aspek utama dalam penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah. Aspek utama dalam penyerasian terdapat 8 elemen yaitu : (1) Geografis (2) Sumber Daya Alam (3) Sumber Daya Manusia (4) Kelembagaan (5) Perekonomian (6) Infrastruktur (7) Anggaran (8) Regulasi, kedelapan aspek ini sudah representasi dari hasil kajian dan analisis serta fakta di lapangan.

Untuk aspek pengendalian terdapat 4 aspek utama yaitu : (1) zonasi peruntukkan ruang pengembangan wilayah (2) kelestarian lingkungan hidup (3) Kerawanan bencana alam (4) pengembangan potensi lokal, keempat aspek ini secara umum sebagai pengendali terhadap perkembangan dan pertumbuhan pembangunan di daerah. Pembagian Tipologi Wilayah berdasarkan klasen adalah untuk mempertajam rencana dan program penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah secara lebih spesifik.

Tipologi kewilayahan dalam dimensi **wilayah maju dan cepat tumbuh, wilayah berkembang, wilayah lamban, dan wilayah tertinggal. Potensi demografi, kekayaan sumber daya alam, serta letak geografis yang strategis** merupakan faktor-faktor yang sangat bermanfaat untuk tujuan percepatan pertumbuhan maupun perluasan pembangunan ekonomi disamping faktor tantangan dan kendala seperti **struktur perkonomian** yang masih terfokus pada pertanian dan industri yang mengekstraksi dan mengumpulkan hasil alam; **penyediaan infrastruktur** untuk mendukung aktivitas ekonomi; **kualitas sumber daya manusia** juga masih menjadi tantangan.

Disamping itu perlu dipahami juga kemampuan pemerintah melalui **ABPN dan APBD dalam pembiayaan pembangunan sangat terbatas**. Dinamika ekonomi suatu negara pada akhirnya akan tergantung pada dunia usaha yang mencakup BUMN, BUMD, dan swasta domestik dan asing. Untuk itu **regulasi** yang ada dapat mendorong partisipasi dunia usaha secara maksimal untuk membangun berbagai macam industri dan infrastruktur yang diperlukan. Karena itu percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi memerlukan evaluasi terhadap seluruh kerangka regulasi yang ada, dan kemudian langkah-langkah strategis diambil untuk merevisi dan merubah regulasi sehingga mendorong partisipasi maksimal yang sehat dari dunia usaha berdasarkan tipologi kewilayahannya.

Sasaran penyerasian pengembangan wilayah adalah: (1) Mendorong pertumbuhan suatu wilayah/kawasan berbasis sektor/komoditi unggulan; (2) Mengurangi kesenjangan antar wilayah; dan (3) Meningkatkan konektivitas antar wilayah, dengan mempertimbangkan faktor-faktor 1) Geografis (2) Sumber Daya Alam (3) Sumber Daya Manusia (4) Kelembagaan (5) Perekonomian (6) Infrastruktur (7) Anggaran (8) Regulasi. Dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa kebijakan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah serta dapat digunakan sebagai instrumen kebijakan pembangunan.

Kelembagaan dan organisasi didalam suatu pemerintahan menjadi salah satu dasar dalam tugas dan fungsi serta job deskripsi bagi para aparaturnya. Perubahan dan reorganisasi dalam pemerintahan menjadi salah satu agenda, sesuai dengan reformasi birokrasi yang bertujuan melakukan efisiensi dan peningkatan pelayanan kepada publik. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan penyerasian dan pengendalian pengembangan wilayah diperlukan suatu model organisasi dan kelembagaan yang supportif.

Manajemen dan pengelolaan pekerjaan didalam pemerintahan daerah menjadi salah satu aspek penting untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemampuan manajemen dalam

mengantisipasi perubahan dan mengadopsi aspirasi publik, menjadi salah satu harapan bagi masyarakat dalam pembangunan wilayah.

## V. DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2006), Undang-Undang Otonomi Daerah: *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat Dan Pemerintah Daerah*, Jakarta : Fokusmedia,.
- Anonim, (2007) Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007. Jakarta : Penelitian Bapenas dan UNDP.
- deBlij, HJ., et all., (1992) *In Geography Regions and Concepts*. Canada : John Wiley and Son Inc..
- Haggett, P., (2001) *In Geography. A Global Synthesis*, First Publication. England : Prentice Hall..
- Harmantyo, Djoko, (2007) Pemekaran Daerah Dan Konflik Keruangan Kebijakan Otonomi Daerah Dan Implementasinya Di Indonesia, *Jurnal Makara Sains*, Vol. 11, No. 1, April 2007: 16-22.
- Hartati, Gini, dan Syarifudin, Deden, (2008) Analisis Kondisi Infrastruktur Desa Tertinggal dalam Perspektif Penanggulangan Kemiskinan : Wilayah Studi Kabupaten Ciamis. Ciamis : Penelitian Dosen Muda Universitas Galuh.
- Landiyanto, Erlangga Agustino, (2005) Kinerja Keuangan dan Stategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. Surabaya : Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Mayer, B. 2000. *The Dynamics of Conflict Resolution: A practitioner's guide*. San Fransisco: Jossey-Bass.
- Nisjar, Karhi (2002). Bahan Kuliah Ilmu Administrasi Negara Lanjut Kontemporer. Bandung : Program Pasca Sarjana, Universitas Padjajaran.
- Pollit, C. & G.Bouckaert. 2000. *Public Management Reform: A Comparative Analysis*. New York: Oxford University Press.
- Syarifudin, Deden, (2008) Strategi Pengembangan Desa Tertinggal Wilayah Darat dan Pesisir dalam Perspektif Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia. Bandung :Wilayah Studi Kabupaten Ciamis, Tesis Magister, Institut Teknologi Bandung.

- Syarifudin, Deden, (2011). Analisis Kondisi Infrastruktur Desa Tertinggal dalam perspektif Penanggulangan Kemiskinan : Wilayah Studi Kabupaten Ciamis, Jurnal Pemasaran dan Sumberdaya Manusia Januari 2011 Volume 13 Nomor 1, ISSN : 1411-8661. Ciamis : Program Pascasarjana Universitas Galuh , halaman 67-91.
- Thoha, Miftah (1999). Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani. Jakarta : Lembaga Administrasi Negara.
- Usman, Syaikh et.al., (2000) Persiapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kasus Kota Sukabumi Jawa Barat. Jakarta : Penelitian Smeru, Bank Dunia, AusAID, ASEM dan USAID.
- Warsono, Hadi, (2009). Regionalisasi dan Manajemen Kerjasama Antar Daerah : Studi Kasus Dinamika Kerjasama Antar Daerah yang Berdekatan di Jawa Tengah, Disertasi. Yogyakarta: Program Doktor Ilmu Administrasi Negara, Universitas Gajah Mada.
- Yin, Robert, K., (1994) Terjemahan Mudzakir, M., Djauzi, *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta : Penerbit Raja Grafindo Persada.